



PT. BPR DANA USAHA
BANK PERKREDITAN RAKYAT

No. Surat: 009 /BDU-OJK/I/2023

Jakarta, 31 Januari 2023

Kepada Yth :

Bpk./Ibu Pengawas Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kantor Regional 1 (KR-1)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wisma Mulia

JL. Jendral Gatot Subroto

DKI Jakarta

Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola 2022**

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT. BPR Dana Usaha telah melaporkan Laporan Tata Kelola 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR PERBARINDO; dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan pada tanggal 31 Januari 2023 sesuai POJK No 4/POJK.03/2015 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT





PT. BPR DANA USAHA
BANK PERKREDITAN RAKYAT

No. Surat: 010 /BDU-OJK/I/2023

Jakarta, 31 Januari 2023

Kepada Yth :

Perbarindo & Majalah Media BPR
Rumah Perbarindo
Komplek Patra II No. 46
Jl. Ahmad Yani – Bypass, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola 2022**

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT. BPR Dana Usaha telah melaporkan Laporan Tata Kelola 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR PERBARINDO; dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan pada tanggal 31 Januari 2023 sesuai POJK No 4/POJK.03/2015 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Hormat Kami,

Felicia Heryanto
Direktur

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Dana Usaha

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505380-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600010-30012023235922

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

heryanto.felicia@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-30 23:59:22



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Alamat : Jl Gunung Sahari Raya no.6 , Jakarta Pusat 10720
Nomor Telepon : 0216299486
Penjelasan Umum : Pelaporan Tata Kelola Rutin BPR Konvensional PT BPR Dana Usaha

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	LIE HERYANTO	Komisaris Utama	KOMISARIS UTAMA
2	PELITA YANTI, S.SI	Komisaris dan Independen	KOMISARIS DAN INDEPENDEN

Rekomendasi Kepada Direksi

KOMISARIS MEREKOMENDASIKAN DIREKSI UNTUK MEMENUHI KEKURANGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN MENCAPAI TARGET RENCANA BISNIS

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	FELICIA HERYANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	KHOE KWOK TJONG	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan antar sesama Anggota Direksi maupun diantara Direksi dan Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	KHOE KWOK TJONG	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FELICIA HERYANTO	tidak ada	tidak ada	Lie Heryanto

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungun keluarga antar sesama Direksi atau antara Direktur Utama dan Pemegang Saham. Direktur adalah anak Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	LIE HERYANTO	4.000.000.000	80,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bapak Lie Heryanto memiliki 80% saham BPR dan menjabat sebagai Komisaris Utama

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	LIE HERYANTO	BPR ANUGERAH ARTASENTOSA PRIMA	80,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama memiliki 80% saham di BPR Anugerah Artasentosa Prima sejumlah IDR 4.000.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	LIE HERYANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	PELITA YANTI, S.SI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan sesama anggota Komisaris maupun antara anggota Komisaris dan Direksi. Tidak ada hubungan keuangan antara Komisaris dan Pemegang Saham. Komisaris Utama adalah Pemegang Saham mayoritas BPR Dana Usaha.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	LIE HERYANTO	tidak ada	Direktur Felicia Heryanto sebagai Anak	tidak ada
2	PELITA YANTI, S.SI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Utama, anggota Direksi maupun Pemegang Saham. Komisaris Utama adalah pemegang saham yang anaknya, Felicia Heryanto, menjabat sebagai Direktur BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	388000000	2	225000000
2	Tunjangan	2	36000000	2	30000000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	Total		424000000		255000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	mobil/motor dan bensin	bensin
3	Asuransi Kesehatan	bpjs kesehatan	bpjs kesehatan
4	Fasilitas lainnya	pulsa telepon	pulsa telepon

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas dibiayakan perusahaan dengan sepengetahuan pemegang saham dan dimana memungkinkan secara reimbursement

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,18	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,01	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,06	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,83	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,10	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	26-01-2022	4	Rapat Persetujuan Rencana Bisnis 2022
2	31-03-2022	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Triwulan 1 2022
3	30-06-2022	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Semester 1 2022
4	30-09-2022	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Triwulan 3 2022
5	30-12-2022	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Semester 2 2022
6	31-03-2022	2	Rapat Direksi Maret 2022
7	29-04-2022	2	Rapat Direksi April 2022
8	31-05-2022	2	Rapat Direksi Mei 2022
9	30-06-2022	2	Rapat Direksi Juni 2022
10	29-07-2022	2	Rapat Direksi Juli 2022
11	31-08-2022	2	Rapat Direksi Agustus 2022
12	30-09-2022	2	Rapat Direksi September 2022
13	28-10-2022	2	Rapat Direksi Oktober 2022
14	30-11-2022	2	Rapat Direksi November 2022
15	30-12-2022	2	Rapat Direksi Desember 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat dihadiri oleh kedua Direksi dan kedua Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	LIE HERYANTO	15	0	100,00
2	PELITA YANTI, S.SI	15	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris aktif dalam mengawasi operasional BPR sehari - hari

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ditemukan fraud

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	3	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tan Soi Huang dan M Mariati telah ingkrah dan menang, dan dalam proses penyelesaian 1 kasus an. Debitur Riky (akhir Desember 2022)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Nama BPR : PT BPR Dana Usaha
Posisi Laporan : 31-12-2022
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya No. 06, Jakarta Pusat 10720
Nomor Telepon : (021)-6299486
Modal Inti BPR : 9.295.015.000,00
Total Aset BPR : 19.594.662.841,00
Bobot BPR : B
Status Audit Ekstern : Diaudit
Nilai Komposit : 1,5
Peringkat Komposit : 1
Analisis : BPR Dana Usaha memiliki predikat Baik dengan nilai komposit 1.5 dengan peringkat komposit 1 dalam Penerapan Tata Kelola di tahun 2022 dan berkomitmen senantiasa memperbaiki nilai ini.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,40	0,18	1,08	0.216	Terdapat pemisahan tanggung jawab yang jelas antara kedua Direksi yang juga dikawal dengan sistim dual checking untuk menghindari benturan kepentingan.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,45	0,10	1,16	0.174	Dewan komisaris aktif mengawasi kinerja Direksi dan memenuhi tanggung jawab rapat dan pelaporan secara rutin
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Not Applicable
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,40	0,30	1,70	0.170	Terdapat sistim dual checking dan pemantauan pengambilan keputusan secara jelas dan tercatat pada Aplikasi IT BPR maupun pada Rapat Direksi.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	0,72	0,17	1,79	0.179	PE Kepatuhan berfungsi dengan baik dan menyusun kebijakan sesuai POJK, namun perlu diperlukan sosialisasi dan pelatihan secara berkesinambungan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,30	0,80	0,13	2,23	0.223	PE Audit Interen memantau transaksi dan pelaporan keuangan BPR dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	AUDIT KAP bekerja secara independent dan professional memeriksa laporan tahunan BPR
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,50	0,80	0,15	2,45	0.245	Prinsip Manajemen Risiko dilakukan oleh setiap lini kerja BPR namun perlu dilakukan pelatihan SDM.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	Tidak ada pelampauan atau pelanggaran BMPK dan laporan dilakukan secara rutin dan tepat waktu melalui APOLO
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana Bisnis di prediksi berdasarkan ekspektasi dan data real, diawasi realisasinya oleh Direksi dan dilaporkan ke OJK secara tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,40	0,10	1,50	0.113	Kondiris keuangan dan mangement BPR dilaporkan dengan penuh integritas terlihat dari kesehatan rasio dan laba BPR
Nilai Komposit						1.5	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang: 1 bertanggung jawab atas Kredit dan 1 Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Kedua anggota Direksi bertempat tinggal di JABODETABEK
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada lembaga atau perusahaan lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Hanya 50 persen Direksi memiliki hubungan keluarga dgn 50 persen Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi hanya menggunakan jasa eksternal Audit KAP dan IT dan ini didasari kontrak tertulis yang jelas antara BPR dan dengan perusahaan yang memiliki kualifikasi OJK.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Kedua anggota Direksi lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sehingga telah diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi bekerja secara independent tanpa memberikan kuasa umum
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi menindaklanjuti temuan audit OJK dan dalam tahap penyesuaian dalam bidang upah kepegawaian
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyediakan data akurat kepada Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Keputusan diambil berdasarkan mufakat mengutamakan kepentingan perusahaan
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi hal ini tercermin pada BOPO 50 pesen di akhir 2022
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi membiayakan sebagai biaya pendidikan senilai 5persen dari biaya upah & gaji dan telah tersalurkan sebagian untuk semua karyawan dan pengurus BPR
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi kompeten dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas tercermin dengan rasio-rasio BPR yang sehat
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi memiliki dan mematuhi pedoman tata tertib kerja
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi belum mencapai target kuantitas kredit
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi membuat pedoman utk mayoritas unit kerja
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	4	Sebagian rapat Direksi bulanan mengenai pendanaan & kredit dilakukan secara pencatatan pribadi, hanya Sebagian terdokumentasi
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Setiap pribadi fasih mengelola BPR namun penurunan kinerja BPR juga disebabkan lemahnya perkembangan ekonomi 2022
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Laporan ini disampaikan ke OJK, Perbarindo DKI & 1 majalah ekonomi
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR memiliki 2 orang Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah komisaris sama dengan jumlah direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan diangkat melalui RUPS secara on-time.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Kedua komisaris tinggal di Jakarta, tempat kantor BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Not Applicable, Modal inti BPR Dana Usaha dibawah IDR 50 miliar
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Komisaris memiliki pedoman tata tertib kerja & mematuhi
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris hanya menjabat di BPR Anugerah Artasentosa Prima dan BPR Dana Usaha
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	50 persen Dewan Komisaris memiliki hub. Keluarga dengan 50 persen anggota Direksi, tdk melanggar POJK Tata Kelola BPR

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Not Applicable, Modal inti BPR Dana Usaha dibawah IDR 50 miliar sehingga tidak memiliki Komisaris Independent
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Komisaris mengawasi Direksi dan senantiasa memberikan bimbingan tertulis di Rapat Triwulanan Dekom.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Komisaris mengawasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR oleh Direksi
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Komisaris hanya mengetahui mayoritas pengambilan keputusan Direksi atas operasional BPR dan menasihati dimana diperlukan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris mengingatkan selalu agar Direksi menindaklanjuti temuan audit KAP & OJK
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Rapat Dekom dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk memastikan tanggung jawab Direksi

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Rapat Dekom bersifat evaluatif, menganjurkan rencana strategis, dan selalu dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan tertulis
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris mengutamakan keuntungan BPR dan hanya menerima honorarium dan fasilitas dari BPR, Rasio BOPO rendah 50persen tahun 2022
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Komisaris memantau laporan Direksi Kepatuhan yang memerlukan tinjau lanjut kedua Direksi
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,45	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Rapat Dekom didokumentasikan secara tertulis setiap 3 bulan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Setiap pekerja BPR menandatangani non compete agreement termasuk komitmen benturan kepentingan dalam proses penerimaan karyawan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Komisaris senantiasa mengawasi agar keputusan yang diambil direksi mengutamakan kepentingan BPR, tdk ada kredit utk pihak terkait dan BOPO rendah 50persen di 2022
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Pengambilan keputusan dgn benturan kepentingan terdokumentasi layaknya hapus buku yang direkomendasikan OJK
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direktur Kepatuhan tdk menyalurkan kredit
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direktur Kepatuhan senantiasa mengikuti semua sosialisasi POJK terbaru dan menaatinya
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Sdri. Novia Santi menjabat sebagai PE Kepatuhan dan independent terhadap fungsi operasional BPR tanpa ada hubungan keluarga atau semenda dengan karyawan dan pengurus BPR
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE Kepatuhan menyusun sebagian besar pedoman kerja & SOP untuk unit kerja BPR
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki SOP PE Kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan memenuhi seluruh POJK dan menyampaikan laporan kepada OJK dan otoritas lain (LPS, Pajak, PPATK, BI, dll.)
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Dir. Kepatuhan sudah mensosialisasikan peraturan terkini utk BPR
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Direktur Kepatuhan memantau kepatuhan BPR atas komitmen kepada otoritas
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan memastikan mayoritas kebijakan, ketentuan, sistem & prosedur dilakukan oleh BPR sesuai peraturan OJK
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan telah merevidi sebagian penyempurnaan kebijakan & SOP BPR sesuai peraturan otoritas terkini
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,72	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Pelanggaran Pemeriksaan Umum OJK menurun, begitu juga sanksi keterlambatan dari tahun ke tahun

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Dir. Kepatuhan menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,17	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Sdri. Shervi Hoyusnandar, sebelumnya Pembukuan, menjabat sebagai PE Audit Intern sejak 2017
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	PE Kepatuhan memiliki sebagian pedoman SOP Audit Intern yang telah dikinikan sesuai peraturan otoritas dan disetujui Direksi dan diketahui Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	PE Kepatuhan independent terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	PE Kepatuhan bertanggung jawab kepada Dir. Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	5	BPR memiliki PE Audit Intern yang sangat berpengalaman dengan latar belakang 8 tahun pembukuan BPR
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,30	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR mempunyai PE Audit Intern yang mematuhi seluruh pedoman berlaku

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Not Applicable
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan Audit Intern sepenuhnya memadai dan independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	PE Audit Intern sudah mengikuti pelatihan terakreditasi
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Laporan Audit Intern telah disampaikan ke Dir. Kepatuhan, Dirut & Komisaris
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan ke OJK Lap. Pokok-pokok hasil Audit Intern ke OJK on time
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Not Applicable

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Tidak ada pengangkatan atau pemberhentian PE Audit Intern namun bila ada akan disampaikan ke OJK sesuai peraturan berlaku
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Audit KAP BPR memenuhi aspek legalitas yang ditentukan OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Audit KAP terakreditasi & terdaftar di OJK
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah Lapor
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	KAP memaparkan permasalahan BPR secara on time
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan Hasil Audit sesuai aturan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah menunjuk PE Manajemen Risiko sejak tahun 2018 dan telah ditatausahakan oleh OJK, yakni Sdri. Novia Santi
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR sudah memiliki SOP MR
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	5	BPR belum memiliki kebijakan tertulis pengelolaan Risiko per produk
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi memiliki kebijakan Manajemen Risiko dan Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	BPR memiliki kebijakan dan SOP Manajemen Risiko yg dievaluasi dan disetujui Dekom. Dimana diperlukan persetujuan Komisaris, Direksi melaporkan hal tsb utk menghindari benturan kepentingan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Direksi identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan mayoritas Risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Direksi menerapkan pengendalian intern bagi mayoritas kegiatan
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi menerapkan pengendalian intern sesuai POJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Core banking menyediakan data utuh, kini, dan akurat dan di back up setiap hari di DRC
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi memberikan pelatihan kepada PE dan karyawan pelatihan yang dianggap relevan untuk BPR
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR memiliki profil risiko dari sisi Kredit, operasional, kepatuhan, dan likuiditas
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak memiliki produk atau aktivitas baru, bila ada akan dilaporkan ke OJK
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR memiliki dan mematuhi peraturan BMPK yang berlaku dengan monitoring berkelanjutan, tdk ada pelampauan atau pelanggaran BMPK di 2021
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR evaluasi & mengkinikan keadaan BPR agar tidak menyalahi BMPK
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Di tahun 2021 tidak ada pemberian kredit ke pihak terkait dan pemberian kredit telah memenuhi ketentuan BMPK yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR secara on time memberikan laporan berkala BMPK kepada OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ditemukan pelanggaran BMPK dalam BPR

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Direksi menyusun RB & disetujui Komisaris selaras dengan visi misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR memiliki cakupan sesuai ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Pemegang Saham mendukung sepenuhnya penguatan permodalan & infrastruktur BPR dalam RB
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	RB memperhitungkan faktor eksternal, internal, MR & azas kesehatan perbankan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Komisaris mengawasi terlaksananya RB
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR ontime menyampaikan RB pada 2021 dan tidak ada revisi
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem informasi manajemen BPR memadai dan SDM BPR mayoritas kompeten dan terus mengikuti pelatihan yg relevan utk kepentingan bank
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan triwulanan sesuai peraturan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan tahunan sesuai peraturan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR memberikan transparansi lap keuangan secara online, di papan kantor dan dimana dimintakan oleh seluruh stakeholder
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Semua laporan BPR dilaporkan sesuai dengan POJK berlaku
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan ditandatangani Direksi dan disampaikan secara lengkap dan ontime kepada OJK, dan dipublikasikan sesuai ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan pengaduan nasabah dilaporkan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Laporan Tata Kelola PT. BPR Dana Usaha Periode 2022

Kesimpulan Umum

Kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor adalah sbb:

1. Kedua Direksi BPR dinilai berpengalaman, kompeten, melaporkan transparansi keadaan BPR bagi seluruh stakeholders, independent dan berhasil menjalankan tanggung jawabnya masing-masing tanpa overlapping job antara perkreditan oleh Direktur Utama dan Kepatuhan maupun pendanaan oleh Direktur Kepatuhan. Tidak ditemukan pemanfaatan BPR untuk kepentingan pribadi. Direksi telah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat BPR dengan mengikuti rekomendasi OJK untuk pembentukan cadangan imbalan kerja dan memberikan UMR kepada karyawan tetap dengan gaji terendah. Terdapat saran dari OJK yang juga terus ditindaklanjuti adalah penajaman analisis debitur BPR dan pembaharuan data SLIK untuk debitur yang memperpanjang fasilitas nasabah, dan agar data tersebut dilaporkan kepada para pengawas.
2. Kedua Komisaris BPR dinilai berpengalaman, kompeten, dan mengawasi BPR untuk beroperasi demi kepentingan perusahaan. Komisaris Utama dan Direktur memiliki hub. Keluarga namun sesuai dengan POJK tentang Tata Kelola BPR tidak lebih dari 50% anggota Dewan Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris.
3. Faktor ke 3 Not Applicable karena untuk BPR dengan modal inti paling sedikit IDR 80 Miliar.
4. Benturan Kepentingan di BPR belum memiliki SOP yang memadai namun sistem check & balances antara karyawan, direksi, maupun komisaris telah berjalan dengan baik sehingga BOPO maupun ROA menunjukkan pengutamakan kepentingan BPR diatas kepentingan pribadi. Tidak ada kredit yang disalurkan kepada pihak utama & pihak terkait. BPR juga menyisihkan Sebagian labanya sekitar 10% sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal BPR dan BOPO hanya 50%.
5. Fungsi Kepatuhan sudah terimplementasi oleh PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU-PPT dibawah Direktur Kepatuhan namun demikian masih ada sebagian SOP yang harus diperbaharui dan dibuat baru agar relevan dengan operasional BPR dan ketentuan OJK. Penyampaian laporan terhadap OJK telah dilakukan sesuai POJK terbaru.
6. Fungsi Audit Intern juga sudah berfungsi kompeten, independent, transparan, dan melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara independent. PE Audit Intern melapor langsung kepada Direktur Utama.
7. Fungsi Audit Ekstern sudah berfungsi secara independent, kompeten, transparan, dan memberikan rekomendasi, perbaikan, dan penyusunan cakupan laporan sesuai ketentuan OJK yang berlaku. Audit Ekstern Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan adalah pihak independent yang terakreditasi KAP dan terdaftar di OJK.

8. BPR memiliki PE Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan. SOP Direktur Kepatuhan dan SOP PE Manajemen Risiko dikinikan sesuai POJK yang berlaku. PE APU PPT mengawasi CS/Kasir agar profile risiko Nasabah dikinikan dan dilaporkan secara transparan kepada PPATK dan EOI untuk masalah APU PPT dan perpajakan. Direktur memiliki rincian profil risiko dan menyetujui transaksi diatas nominal tertentu dan dimana ada benturan kepentingan atau risiko memadai, dilaporkan kepada Komisaris.
 9. Sistem pengawasan, pelaksanaan pemberian kredit, dan pelaporan BMPK pada BPR sudah sesuai peraturan OJK. Terdapat 1 kekosongan jabatan yakni Customer Service/ Marketing Kredit dan diharapkan dapat dipenuhi di tahun 2023. Tidak ditemukan pelanggaran ataupun pencairan kredit terhadap pihak terkait.
 10. Sistem pelaporan rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dengan memperhitungkan faktor ekstern & intern yang akan mempengaruhi kinerja BPR ke depannya sesuai ketentuan terkini melalui sistem APOLO dan juga secara tepat waktu disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kepentingan pengawasan dengan tembusan ke Pemegang Saham.
 11. BPR melakukan sistem pelaporan keuangan dan manajemen kepada pihak otoritas secara transparan dan tepat waktu kepada OJK, PPATK, LPS, dan BI. BPR juga membayar pungutan secara tepat waktu dan sesuai tagihan di tahun 2022.
- BPR Dana Usaha memiliki predikat Baik dengan nilai komposit 1.5 dengan peringkat komposit 1 (satu) dalam Penerapan Tata Kelola di tahun 2022 sama seperti tahun sebelumnya dan pengurus berkomitmen senantiasa memperbaiki nilai ini.

Jakarta, 30 Januari 2023

Direksi,

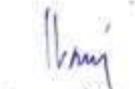
Dewan Komisaris,



Khoe Kwok Tjhong **Felicia Heryanto**
Direktur Utama Direktur



Lie Heryanto
Komisaris Utama



Pelita Yanti
Komisaris

LEMBAR PERSETUJUAN

Demikianlah Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2022 PT. BPR Dana Usaha ini disusun dan telah disetujui oleh segenap Dewan Direksi dan Komisaris.

Jakarta, 30 Januari 2023

DEWAN DIREKSI



Khoe Kwok Tjhong **Felicia Heryanto**
Direktur Utama Direktur

DEWAN KOMISARIS



Lie Heryanto
Komisaris Utama



Pelita Yanti
Komisaris